

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Profil OJK Sulawesi Tenggara

Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara (OJK Sultra) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1. OJK Sultra berafiliasi dengan organisasi yang memiliki misi untuk mengatur industri jasa keuangan dan mendukung badan usaha dan masyarakat melalui penerbitan perizinan untuk sektor keuangan, khususnya dalam rangka inklusi keuangan. Selain itu, OJK juga memberikan dukungan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai literasi keuangan konvensional dan syariah. Didirikan dengan tujuan untuk mengawasi pasar modal, perbankan, dan lembaga non-bank, kerangka kerja ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai masalah keuangan yang berkaitan dengan domain operasional OJK.

Secara keseluruhan, OJK telah berdiri sejak tahun 2011, namun OJK Sultra baru secara resmi terorganisir dan beroperasi pada tanggal 2 Januari 2014. Dari tahun 2014 hingga 2017, organisasi ini dipimpin oleh Bapak Widodo; dari tahun 2017 hingga 2021, posisi tersebut dijabat oleh Bapak Fredly Nasution; beliau memimpin OJK selama empat tahun; dan sejak tahun 2021, Bapak Arjaya Dwi Raya memimpin OJK.

OJK Sultra awalnya beroperasi dari sebuah ruangan di dalam gedung BI Sultra di Jalan Sultan Hasanuddin, di mana OJK berkantor, hingga kemudian pindah ke lokasi yang sekarang di Jalan Abdullah Silondae pada tanggal 2 Februari 2016. Status pinjam pakai gedung tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara. Peresmian kantor tersebut dilakukan oleh Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan HM Saleh Lasata, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Muliaman mengatakan bahwa

“OJK harus lebih meningkatkan tanggung jawabnya dalam mengawasi dan mengatur sektor perbankan dan keuangan non-bank, selain memperluas cakupan inisiatif edukasi dan perlindungan konsumen. Pendirian kantor OJK yang baru ini diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas yang lebih besar terhadap layanan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.” (Suparman, 2016).

Kehadiran OJK Sultra diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat dengan mempermudah akses terhadap lembaga jasa keuangan dan berbagai program edukasi. OJK, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab yang luas, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan fungsi, kewajiban, dan wewenangnya. Berbagai inisiatif edukasi dan keterlibatan masyarakat telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan

kesadaran dan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.

4.1.2. Visi dan Misi OJK Sulawesi Tenggara

Tujuan utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang memiliki reputasi baik di sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat umum, serta mendorong industri jasa keuangan untuk berkembang menjadi penggerak perekonomian nasional yang berdaya saing global dan mampu memajukan kesejahteraan masyarakat.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

1. Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Membangun sistem keuangan yang stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.
3. Melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.

4.1.3. Struktur Organisasi OJK Sulawesi Tenggara

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: Data OJK Sulawesi Tenggara 2024

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Sulawesi Tenggara

4.2.1.1. Literasi Keuangan Syariah Sulawesi Tenggara

Tujuan kehadiran OJK Sultra adalah untuk memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan inklusi dan literasi keuangan konvensional dan syariah di Sulawesi Tenggara melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang mayoritas

penduduknya beragama Islam. Menurut informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Muslim di Sulawesi Tenggara mencapai 2,56 juta jiwa pada Juni 2021 (Kusnandar, 2021). Menurut Bapak Imam Adicipta Nursantoso:

“survei telah dilakukan oleh OJK dalam tiga kesempatan terpisah (pada tahun 2016, 2019, dan 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat variabilitas dalam tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Secara khusus, tingkat tersebut menurun dari 9,50% pada tahun 2016 menjadi 1,05% pada tahun 2019, dan kemudian meningkat menjadi 7,27% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa berdasarkan tanggapan yang diperoleh, masih terdapat tingkat pemahaman yang terbatas mengenai produk jasa keuangan syariah”.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terbatasnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, khususnya di Sulawesi Tenggara, adalah kemampuan membaca masyarakat yang relatif rendah. Bapak Imam Adicipta Nursantoso mengungkapkan hal berikut:

“Masyarakat kita dikategorikan memiliki kemampuan literasi yang rendah dan terus memiliki pengetahuan yang terbatas tentang produk keuangan syariah, termasuk terminologi produk yang tidak dikenal. Fakta bahwa Sulawesi Tenggara sebagian besar dihuni oleh

masyarakat Muslim menunjukkan bahwa tingkat literasi yang rendah menunjukkan bahwa mereka masih belum terbiasa dengan agama tersebut.

OJK Sulawesi Tenggara dihadapkan pada peluang sekaligus tantangan dalam upayanya untuk mempromosikan inklusi dan literasi keuangan syariah di wilayah ini. Literasi keuangan syariah sangat penting bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengelola keuangannya secara cerdas dengan memperhatikan aspek-aspek syariah dan tidak mudah tertipu oleh produk-produk investasi yang tidak sesuai syariah. Individu yang memiliki kemampuan literasi keuangan syariah yang mumpuni akan memiliki peluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari OJK Sulawesi Tenggara dan individu yang pernah mengikuti acara edukasi yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum. Dengan mempertimbangkan latar belakang informan, terlihat bahwa pengalaman pendidikan Islam dan keanggotaan dalam komunitas Muslim tidak secara otomatis mengindikasikan tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi. Sejumlah informan yang disurvei setuju bahwa program edukasi OJK sangat bermanfaat dan memfasilitasi pemahaman masyarakat terhadap

literasi keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Khairil Subki yang menyatakan bahwa:

“Sangat bermanfaat, terutama mengingat fakta bahwa sebagian besar orang menanyakan perbedaan antara konvensional dan syariah. Karena masyarakat pada umumnya memahami pembiayaan dan tidak dapat membedakan antara konsep syariah dan konvensional, maka penjelasan kemarin secara efektif telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut.”

Literasi keuangan syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, serta prinsip-prinsip keuangan syariah. Diharapkan bahwa kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah akan membantu individu dalam memanfaatkan dan mengawasi keuangan mereka dengan cara yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

POJK No.3 tahun 2023 mengatur hal ini. Menetapkan bahwa OJK Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan untuk mengatur seluruh industri jasa keuangan dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan inklusi masyarakat dan konsumen, peraturan ini mengatur seluruh sektor jasa keuangan.

Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang besar untuk pengembangan keuangan syariah, menurut pandangan staf OJK Sulawesi Tenggara. Namun, tingkat literasi keuangan syariah di wilayah ini masih belum memadai, terutama dalam hal pemahaman terhadap produk dan akad yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya akses terhadap edukasi dan informasi mengenai keuangan syariah, ketidaktahuan mengenai pentingnya literasi keuangan, serta praktik budaya dan masyarakat yang kurang kondusif bagi pengembangan literasi keuangan syariah. Terbatasnya pemahaman tentang keuangan syariah di Sulawesi Tenggara memiliki konsekuensi yang luas, termasuk menurunnya adopsi produk dan layanan keuangan syariah, meningkatnya risiko keuangan, dan ketidakstabilan ekonomi di kalangan rumah tangga dan individu. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara melalui inisiatif-inisiatif yang lebih terpadu dan ekstensif, seperti program-program sosialisasi dan edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.

4.2.1.2. Inklusi Keuangan Syariah Sulawesi Tenggara

Ketersediaan lembaga keuangan syariah yang terbatas berkontribusi pada masalah inklusi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara. Khususnya di industri keuangan, Sulawesi Tenggara masih sangat terbelakang. Menurut Bapak Imam Adicipta Nursantoso:

“kehadiran lembaga jasa keuangan syariah di Sulawesi Tenggara masih sangat minim, dengan bank-bank syariah yang belum didirikan di semua provinsi. Akses masyarakat menjadi sangat terbatas, karena jumlah lembaga jasa keuangan syariah yang ada masih relatif sedikit, mengingat inklusi sangat bergantung pada aksesibilitas lembaga-lembaga tersebut.

Faktor penentu utama yang menghambat tingkat inklusi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara adalah terbatasnya ketersediaan lembaga keuangan syariah. Pada saat ini, OJK terus berupaya untuk mendorong inklusi yang lebih besar melalui kolaborasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan keuangan syariah. Di lokasi-lokasi di mana OJK menyelenggarakan acara-acara edukasi dan menyampaikan undangan kepada lembaga-lembaga jasa keuangan. Seperti yang tergabung dalam program OJK Mengajar melalui kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Selain menerima edukasi keuangan syariah,

anggota masyarakat dapat membuka rekening di Bank Syariah Indonesia. Hal ini merupakan strategi yang sangat efektif untuk mempromosikan inklusi dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum. Selain itu, OJK mengimplementasikan inisiatif TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah), sebuah forum koordinasi yang terdiri dari lembaga-lembaga dan pemangku kepentingan terkait yang memiliki misi untuk mempercepat akses keuangan daerah dengan tujuan akhir untuk mendorong perluasan ekonomi daerah dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara, OJK berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga jasa keuangan. Meskipun tidak terlibat dalam penerbitan produk atau layanan keuangan syariah, OJK menawarkan inisiatif edukasi yang berkaitan dengan pemanfaatan yang tepat dari penawaran tersebut. Selain itu, meskipun OJK telah menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan konversi Bank Sultra atau BPR milik pemerintah menjadi syariah, OJK tidak memiliki wewenang untuk memaksa tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh Bapak Imam Adicipta Nursantoso::

“Meskipun kami telah mengadvokasi pendirian lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah, hal ini belum terjadi. Meskipun kami telah mendukung niat pemerintah untuk mengkonversi Bank Sultra atau BPR milik pemerintah, Bahteramas, menjadi syariah, hal itu mungkin saja terjadi; namun, kami tidak dapat memaksakan transisi seperti itu pada saat ini”.

Tingkat inklusi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara masih rendah, menurut temuan penelitian lapangan, hal ini disebabkan oleh kurangnya akses yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, pemahaman yang kurang memadai mengenai keuangan syariah di kalangan masyarakat umum juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah, untuk mendorong pertumbuhan akses keuangan bagi masyarakat dan memastikan keberhasilan program TPAKD yang diprakarsai oleh OJK.

4.2.2. Program Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK Sulawesi Tenggara

OJK Sulawesi Tenggara bertujuan untuk berkontribusi pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah ini, yang mencakup praktik-praktik konvensional dan Syariah, melalui berbagai inisiatif edukasi dan sosialisasi berbasis masyarakat. Bapak Imam Adicipta Nursantoso mengatakan:

“Kegiatan edukasi merupakan strategi utama kami dalam mempromosikan inklusi dan literasi keuangan syariah”.

Dengan memanfaatkan temuan-temuan dari penelitian lapangan, OJK Sulawesi Tenggara telah berkolaborasi dengan mahasiswa dan lembaga jasa keuangan untuk mengimplementasikan berbagai program edukasi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Adicipta Nursantoso:

“Untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Sulawesi Tenggara, kami telah melakukan berbagai inisiatif. Dalam hal ini, kami membina para pelajar binaan OJK melalui Komunitas Learning Center (KLC) dan mendorong partisipasi mereka dalam berbagai acara dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan syariah. Untuk itu, kami berkolaborasi dengan sejumlah lembaga jasa keuangan, termasuk Bank Muamalah dan Bank Syariah Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan prinsip-prinsip syariah.”.

OJK Sulawesi Tenggara telah mengimplementasikan program pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah

yang terdiri dari beberapa kegiatan yang masing-masing dirancang untuk mencapai tujuan yang berbeda. Data tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rangkaian Program Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Syariah OJK Sulawesi Tenggara

No	Nama Program	Sasaran	Frekuensi Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	OJK Mengajar	Masyarakat	1	Desa lambusa, Kab.Konawe Selatan	2023	60 Orang
2	OJK Goes To Campus	Mahasiswa	1	Universitas Muhammadiyah Kendari	2023	-
3	KLC (Komunitas Learning Center)	Mahasiswa	1	Kota Kendari	2016	40
4	SAKINAH (Santri Cakap Keuangan) dan EPIKS (Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah)	Pelajar (SMP dan SMA)	1	Pesantren Al-Ikhlas Lambuya, Kab.Konawe	2023	260 Orang
5	TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah)	Masyarakat	7	1. Sulawesi Tenggara 2. Kendari 3. Konawe Selatan 4. Bombana 5. Konawe 6. Kolaka Timur 7. Buton Utara	1. 2021 2. 2021 3. 2019 4. 2023 5. 2023 6. 2021 7. 2022	-

Sumber: Data OJK Sulawesi Tenggara 2024

1. Program OJK Mengajar

OJK berperan sebagai lembaga edukasi dan pendampingan dengan tanggung jawab dan fungsi yang menjangkau masyarakat melalui program pengajaran. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan atribut produk dan layanan

keuangan, dengan fokus khusus pada literasi keuangan syariah.

Program OJK Mengajar berkontribusi dalam pembentukan keuangan inklusif di daerah pedesaan sebagai bagian dari inisiatif Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Sebanyak 60 orang berpartisipasi dalam program komunitas di Desa Lambusa, yang dilaksanakan oleh OJK Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan strategi untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan di daerah. OJK dan Bank Syariah Indonesia, sebuah Lembaga Jasa Keuangan Syariah, berkolaborasi dalam upaya ini. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka rekening secara langsung di lokasi acara. Pembukaan rekening ini merupakan inisiatif OJK untuk mendorong inklusi keuangan masyarakat yang lebih besar terhadap produk keuangan syariah sehingga OJK dapat mencapai tujuannya untuk memastikan literasi keuangan syariah dan inklusi masyarakat terdistribusi secara merata. Pelaksanaan program OJK Mengajar tidak diragukan lagi menimbulkan reaksi dan keterlibatan yang baik dari anggota masyarakat. Bapak Khairil Subki mengatakan:

“Kegiatan ini memungkinkan individu untuk membedakan antara keuangan konvensional dan syariah, dan bagi mereka yang belum mendapatkan layanan keuangan dapat melakukannya dengan berpartisipasi di OJK, khususnya dengan membuat rekening gratis.”

Peneliti, selain meneliti dampak dari program OJK Mengajar, juga menanyakan tingkat pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah. Penulis menyimpulkan, berdasarkan pernyataan sejumlah informan, bahwa program OJK Mengajar sangat efektif dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, karena bersamaan dengan pembukaan rekening gratis bagi masyarakat.

2. Program KLC (Komunitas Learning Center)

KLC Otoritas Jasa Keuangan merupakan perpanjangan tangan dari OJK Sulawesi Tenggara yang dibentuk oleh OJK melalui kerjasama dan dukungan mahasiswa dalam rangka mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah operasional OJK Sulawesi Tenggara. Menurut data wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti dari pegawai OJK Sultra, organisasi ini memiliki lebih dari sepuluh peserta dalam kompetisi Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) pada tahun sebelumnya. Saudari Pingki, ketua KLC OJK Sultra, menyatakan bahwa kehadiran KLC tidak dapat dipungkiri memberikan manfaat yang sangat besar bagi para mahasiswa, sebagai berikut:

‘Inisiatif pendidikan dan pelatihan OJK memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang keuangan syariah. Program-program ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk keuangan syariah dan mempromosikan literasi keuangan’.

Dengan keikutsertaan anggota KLC yang merupakan mahasiswa, diharapkan program KLC dapat menjadi perpanjangan tangan OJK dalam hal edukasi kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga dapat mengedukasi mahasiswa agar lebih siap dalam menyusun strategi keuangan yang dapat membantu mereka mencapai tujuan ekonominya.

3. Program OJK Goes To Campus

Pertimbangan keuangan harus dimasukkan ke dalam setiap usaha, termasuk usaha generasi milenial. Bukan hal yang aneh jika kaum milenial disibukkan dengan urusan pribadi dan peristiwa terkini, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencatat atau mengelola keuangan secara efektif. Literasi sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang efektif, dan cara hidup milenial mencerminkan hal ini. Oleh karena itu, OJK meluncurkan Program OJK Goes To Campus, sebuah inisiatif yang mengedukasi generasi milenial tentang keuangan dan mendorong mereka untuk menjadi agen edukasi literasi keuangan di masyarakat. Meskipun tujuan utama dari kegiatan OJK Goes To Campus bukanlah literasi keuangan syariah, OJK tetap melaksanakan kegiatan ini untuk mempromosikan materi edukasi keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam upaya mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah.

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan OJK Goes To Campus di Universitas Muhammadiyah Kendari yang dilaksanakan oleh OJK Sulawesi Tenggara. Nila Asriani, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut, menyatakan bahwa:

“Program edukasi dan pelatihan yang dilakukan oleh OJK (Kegiatan OJK Goes To Campus) patut diapresiasi karena mampu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan syariah, produk dan atributnya, yang merupakan konsep yang masih relatif baru, khususnya di kalangan generasi milenial.”

Oleh karena itu, diharapkan OJK dapat melakukan kegiatan serupa di kampus-kampus lain yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara di masa mendatang. Diharapkan pelaksanaan program ini akan meningkatkan kapasitas generasi milenial untuk mengelola keuangan secara efektif dan akurat.

4. Program SAKINAH (Santri Cakep Literasi Keuangan Syariah) dan EPIKS (Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah)

Siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas merupakan fokus dari inisiatif SAKINAH (Santri Cakep Literasi Keuangan Syariah) dan EPIKS (Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah), yang diimplementasikan oleh OJK sebagai upaya untuk

meningkatkan literasi keuangan syariah dan inklusivitas di lingkungan pesantren.

Pembentukan otonomi ekonomi bagi pesantren sangat penting bagi pengembangan fondasi ekonomi nasional yang kokoh. Membantu pesantren dalam mengejar pertumbuhan yang inklusif merupakan komponen dari strategi untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu prinsip dari cetak biru pengembangan ekonomi Islam yang dimasukkan oleh BI ke dalam fungsi pesantren adalah kemandirian ekonomi (www.bi.go.id). Hal ini dicapai melalui program reformasi kelembagaan

Pada pertengahan Desember 2023, OJK Sulawesi Tenggara menyelenggarakan program SAKINAH-EPIKS perdana di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya, Kabupaten Konawe. Kegiatan ini didukung oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Syariah Indonesia, dan Bank Muamalat. Sekitar 260 orang hadir, termasuk para santri, guru, pengurus, dan pimpinan pondok pesantren, serta para pelaku UMKM dari pondok pesantren tersebut. Pimpinan eksekutif organisasi juga turut hadir dalam acara tersebut. Dalam kesempatan ini, Friderica berharap para santri mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai produk dan jasa keuangan syariah serta dapat menerapkan pengetahuan tersebut secara bijaksana untuk mengelola keuangan pribadi mereka secara lebih efektif.

“Kami mendorong adik-adik ini untuk berpartisipasi dalam inklusi keuangan yang sesuai dengan syariah. Awalnya, kami membuat Simul, Simpanan Pelajar Syariah, yang kemudian disusul dengan Simpanan Haji Muda. Tujuannya adalah untuk mendorong mereka memanfaatkan produk jasa keuangan syariah. Dengan sedikit keberuntungan, informasi ini akan tertanam di benak mereka, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu-individu muda yang cerdas secara finansial dan mampu mempersiapkan diri untuk masa depan”.

Program Inklusi Keuangan Syariah juga direpresentasikan dalam kegiatan SAKINAH-EPIKS ini dengan membentuk Agen Laku Pandai di Pondok Pesantren, mendistribusikan produk SimPel Ib dan Kartu Santri kepada seratus orang santri, menawarkan pembiayaan KUR Syariah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di lingkungan pondok pesantren, menghadirkan produk Tabungan Haji Muda kepada sembilan puluh orang santri, serta meresmikan pendirian Pasar Modal Syariah.

Integrasi program SAKINAH-EPIKS diharapkan dapat mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah yang lebih baik di Sulawesi Tenggara, serta menghasilkan duta-duta literasi keuangan syariah di kalangan santri yang akan membantu perluasan literasi keuangan syariah di lingkungan pesantren.

5. Program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan daerah

Inklusi keuangan merupakan faktor penting dalam mencapai pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan,

dan pemerataan pendapatan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, inklusi keuangan merupakan kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, dan hemat biaya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sejak tahun 2012, perumusan strategi dan inisiatif kerja terkait inklusi keuangan telah dilakukan sebagai wujud komitmen Pemerintah Indonesia terhadap inklusi keuangan. Selain itu, Peraturan Presiden No.82 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI) yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016 menjadi arahan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Lebih lanjut, pemerintah mengimplementasikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai langkah tambahan dalam upaya ini.

Program TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait, dengan tujuan mempercepat akses keuangan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Kehadiran TPAKD di berbagai daerah telah mendorong tumbuhnya keunggulan daerah dan mendorong perekonomian daerah. Aspek-aspek yang berkontribusi terhadap keberhasilan TPAKD antara lain

adalah partisipasi dan dukungan kepala daerah dalam penyusunan dan evaluasi program kerja TPAKD, komitmen dan koordinasi seluruh anggota TPAKD, serta program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh kebijakan dan regulasi. Tujuan utama dari program TPAKD adalah sebagai katalisator dalam mendorong akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Realisasi dari visi menyeluruh TPAKD akan dicapai melalui pelaksanaan empat misi yang mencakup berbagai inisiatif kerja. Misi-misi ini diuraikan di bawah ini:

1. Memperkuat kemajuan infrastruktur dan memperluas titik masuk keuangan daerah.
2. Memastikan kelangsungan dan kesinambungan TPAKD dalam jangka panjang.
3. Meningkatkan kemampuan anggota TPAKD dan memperkuat kinerja TPAKD.
4. Memfasilitasi pencapaian tujuan inklusi dan literasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Untuk mendorong percepatan peningkatan akses keuangan daerah, OJK Sulawesi Tenggara telah membentuk program TPAKD bersama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Saat ini, program TPAKD di Sulawesi Tenggara masih belum lengkap, dengan pembentukan hanya

di delapan kabupaten/kota, termasuk di tingkat provinsi. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Daftar TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah)
Sulawesi Tenggara

No	Nama TPAKD	Tahun Terbentuk
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	2021
2	Kota Kendari	2021
3	Kabupaten Bombana	2023
4	Kabupaten Konawe Selatan	2019
5	Kabupaten Konawe	2023
6	Kabupaten Kolaka Timur	2021
7	Kabupaten Buton utara	2022

Sumber: Data OJK Sulawesi Tenggara 2024

Bagi OJK Sulawesi Tenggara, fakta bahwa pembentukan TPAKD membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah masih menjadi kendala. Tentunya, jika pemerintah tidak memiliki konsistensi, OJK akan menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengimplementasikan program ini. Bapak Imam Adicipta Nursantoso mengatakan:

“Pada saat ini, hanya sekitar tujuh TPAKD yang telah dibentuk, termasuk di tingkat provinsi, karena komitmen merupakan prasyarat keberhasilan. Komitmen diperlukan dari para pemimpin daerah, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten untuk mencapai keberhasilan. Jika pemerintah tidak konsisten dan tidak sungguh-sungguh berniat membantu kami, maka akan sulit juga untuk menjalankannya. Hasilnya, sejauh ini kami telah membentuk beberapa, dan Kota Kendari adalah satu-satunya yang saat

ini benar-benar aktif, khususnya di Sulawesi Tenggara; yang lain tidak seefektif yang lain”.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lapangan, inisiatif yang dilakukan oleh OJK secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Disampaikan oleh Bapak Khairul Subki selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam inisiatif OJK:

“Program ini sangat bermanfaat, mengingat sebagian besar masyarakat bertanya tentang perbedaan antara konvensional dan syariah. Karena masyarakat pada umumnya memahami pembiayaan dan tidak menyadari perbedaan antara prinsip syariah dan konvensional, penjelasan kemarin secara efektif memberikan informasi kepada masyarakat.”.

Peneliti juga menggali informasi dari masyarakat lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan Bapak M. Khoiril Rojikin::

“Pada kenyataannya, program ini cukup terpuji; namun, kejadian kemarin mencerminkan dampak dari pinjaman online, karena banyak orang yang terkena dampaknya akibat kurangnya pemahaman tentang legalitas.”

Untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, peneliti juga menanyakan, "Apakah Anda mengenal istilah keuangan syariah?" Bapak Khairil Subki menjawab;

“Berdasarkan apa yang saya kumpulkan dari penjelasan OJK, kontraknya sendiri mengandung perbedaan. Shale

financing berbeda dengan pembiayaan konvensional di mana kreditur membayar pinjaman dengan bunga. Pembiayaan shale beroperasi berdasarkan bagi hasil.”

Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh peneliti kepada masyarakat lainnya. Bapak Khoirul Rojikin berkomentar:

“Keuangan syariah, pada dasarnya, mengacu pada kategori produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip agama sambil memastikan tidak adanya riba”.

Pada dasarnya, literasi keuangan konvensional dan syariah memiliki kesamaan dalam hal definisi, namun berbeda dalam hal kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang digunakan. Dengan kata lain, literasi keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip sunnah dan Alquran. Secara umum, temuan dari wawancara dengan beberapa informan yang berpartisipasi dalam inisiatif edukasi di OJK Sulawesi Tenggara mengindikasikan bahwa kapasitas masyarakat telah meningkat, khususnya terkait literasi keuangan dan pemanfaatan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.2.3. Kendala OJK dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Sulawesi Tenggara

Peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah tentu saja membutuhkan bantuan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kemajuan seperti yang diharapkan dalam SNLKI. Partisipasi masyarakat, selain dari pemerintah daerah dan provinsi serta lembaga jasa keuangan, merupakan faktor penentu dalam perluasan inklusi dan literasi keuangan syariah. Dalam menjalankan program kerjanya, OJK Sulawesi Tenggara tentu menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari OJK maupun dari masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Adicipta Nursantoso:

“kurangnya dukungan dari pemerintah merupakan kendala utama. Dengan demikian, Islam mendominasi di wilayah ini; namun, hal ini menjadi tantangan yang sama besarnya jika pemerintah gagal memberikan dukungan. Lembaga-lembaga jasa keuangan, yang dipandu oleh OJK, bersedia untuk menawarkan bantuan; namun, kegiatan atau inisiatif OJK untuk mempromosikan literasi tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah”.

Kurangnya dukungan pemerintah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi OJK Sulawesi Tenggara dalam upayanya mempromosikan inklusi dan literasi keuangan syariah. Terlepas dari besarnya populasi Muslim di Sulawesi Tenggara, kesadaran masyarakat mengenai literasi keuangan syariah masih sangat terbatas. Terlepas dari kesiapan Lembaga Jasa Keuangan, yang beroperasi di bawah bimbingan OJK,

untuk memberikan bantuan, hal ini tetap tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Selain itu, kurangnya minat terhadap literatur di kalangan masyarakat Sulawesi Tenggara juga menjadi tantangan tambahan bagi OJK. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Imam Adicipta Nursantoso:

“Sulawesi Tenggara, meskipun mayoritas dihuni oleh umat Islam, dikategorikan oleh masyarakat kita sebagai masyarakat yang kurang berpendidikan dan kurang mengenal produk keuangan syariah, termasuk istilah-istilah produk yang tidak familiar. Di Sulawesi Tenggara, kehadiran lembaga jasa keuangan syariah masih langka, dan bank syariah tidak ada di setiap provinsi. Akses masyarakat menjadi sangat terbatas karena jumlah lembaga jasa keuangan syariah yang ada masih relatif sedikit, mengingat inklusi sangat bergantung pada penyediaan akses oleh lembaga jasa keuangan”.

Selain itu, menurut temuan para peneliti, program OJK belum cukup komprehensif untuk menjangkau setiap individu di Sulawesi Tenggara karena cakupan wilayah yang relatif luas. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh OJK. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa OJK Sulawesi Tenggara menghadapi tiga tantangan dalam upayanya untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah: dukungan pemerintah yang kurang memadai, kemampuan membaca yang kurang memadai di kalangan penduduk Sulawesi Tenggara, dan jangkauan wilayah yang terbatas.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK Sulawesi Tenggara

OJK Sulawesi Tenggara memainkan peran penting dalam memajukan inklusi dan literasi keuangan syariah di wilayah ini. Sesuai dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), OJK memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional.

Berdasarkan definisi OJK sebagai lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan, OJK memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur keseluruhan sektor jasa keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Kewenangan ini dijabarkan dalam POJK No.3 tahun 2023, yang berkaitan dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat. Peraturan ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan. Terdapat hubungan yang erat antara literasi dan inklusi. Peningkatan literasi keuangan akan selalu menghasilkan peningkatan indeks inklusi keuangan. Untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah, OJK Sulawesi Tenggara berkolaborasi dengan entitas terkait lainnya dan memaksimalkan pemanfaatan media dan sumber daya untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang literasi keuangan melalui sosialisasi dan edukasi.

Lima program edukasi OJK Sulawesi Tenggara dikhususkan untuk mendorong integrasi masyarakat dan meningkatkan literasi keuangan syariah. Sasaran dari kelima program tersebut bervariasi, mulai dari sesama mahasiswa hingga masyarakat luas. OJK terlibat dalam upaya kolaboratif dengan lembaga jasa keuangan untuk mempromosikan keuangan inklusif sebagai bagian dari implementasi programnya. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah.

Program edukasi keuangan syariah OJK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Program edukasi ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti larangan riba, dan mendorong individu untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan hati-hati, menurut temuan penelitian. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi dapat dicapai oleh masyarakat.

Terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusivitas keuangan syariah di Sulawesi Tenggara, masih terdapat beberapa tantangan yang

dihadapi, salah satunya adalah dukungan masyarakat dan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program edukasi yang telah dilaksanakan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Inklusi keuangan syariah secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, terutama dalam mempercepat akses keuangan daerah; ketiadaan infrastruktur keuangan syariah di daerah, yang menghambat akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, semakin memperparah masalah ini. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam inisiatif edukasi juga sangat penting, karena saat ini banyak individu yang kurang peduli untuk memperluas pengetahuan mereka, terutama mengenai pengelolaan dan administrasi rencana keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan temuan penelitian, strategi dan inisiatif OJK Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah berpusat pada program-program edukasi, seperti program OJK Mengajar, program SAKINAH, dan program OJK Goes To Campus, yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat dengan produk dan lembaga jasa keuangan syariah. OJK bekerja sama dengan sejumlah lembaga jasa keuangan dalam pelaksanaan program tersebut dan membentuk Komunitas Learning Centre (KLC). Komunitas ini mendorong para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai acara dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan syariah.

Selain itu, OJK membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Delapan informan yang telah mengambil bagian dalam program OJK membuktikan bahwa program ini telah secara signifikan meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman mereka tentang manajemen lembaga keuangan syariah, pemanfaatan produk syariah, dan atribut-atribut dari lembaga-lembaga tersebut. Namun demikian, OJK Sulawesi Tenggara belum melaksanakan implementasinya secara maksimal dan menyeluruh, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah Sulawesi Tenggara dan juga sejumlah tantangan lainnya. Sebagai hasilnya, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa kontribusi OJK Sulawesi Tenggara saat ini terhadap literasi masyarakat dan integrasi keuangan syariah masih belum optimal. Hal ini didasarkan pada kelangkaan program dan sifat implementasi yang tidak lengkap.

4.3.2. Kendala OJK dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Salah satu aspek dari penelitian ini adalah rumusan masalah mengenai hambatan yang dihadapi OJK dalam upayanya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis

yang dilakukan oleh para peneliti, OJK menghadapi tiga tantangan berikut ini:

1. Kurangnya Dukungan Pemerintah

Pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong inklusi masyarakat dan literasi keuangan syariah. Sejumlah inisiatif edukasi berbasis masyarakat telah dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Sulawesi Tenggara dan OJK dalam upaya mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah. Kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperluas akses ke lembaga keuangan syariah membutuhkan dukungan pemerintah untuk OJK. Namun, menurut OJK Sulawesi Tenggara, dukungan pemerintah terhadap OJK masih dianggap kurang memadai. Kekurangan tersebut terlihat dari kegagalan pemerintah untuk secara aktif mendukung program TPAKD dan tidak adanya langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas OJK, terutama yang berkaitan dengan perluasan literasi dan inklusivitas keuangan syariah.

Selain itu, daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Muslim lainnya di Indonesia, seperti Bank Aceh, telah mengimplementasikan unit-unit syariah. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Tenggara terus beroperasi sesuai dengan praktik-praktik konvensional dan tidak memiliki unit syariah. OJK Sulawesi Tenggara mengakui bahwa, dalam upaya mempromosikan inklusi keuangan syariah, mereka telah

mengajukan proposal kepada pemerintah mengenai konversi Bank Sulawesi Tenggara ke sistem syariah. Namun demikian, pemerintah belum mengkaji keuangan syariah di wilayah ini

2. Tingkat Literasi Baca Masyarakat yang Rendah

Membaca adalah salah satu metode untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Salah satu masalah yang menjadi perhatian penting dalam hal pengembangan intelektual dan kesejahteraan sosial adalah literasi membaca masyarakat yang tidak memadai. Kurangnya minat terhadap literatur dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk manajemen keuangan. Tidak diragukan lagi, buta huruf dalam membaca akan menghambat kemampuan individu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Menurut OJK Sulawesi Tenggara, hambatan yang signifikan terhadap inklusi dan literasi keuangan syariah di wilayah ini adalah rendahnya tingkat literasi penduduk setempat, yang membuat mereka tidak terbiasa dengan terminologi yang terkait dengan kontrak dan produk keuangan syariah. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mempromosikan budaya membaca sehingga para anggotanya memiliki pengetahuan yang cukup tentang terminologi keuangan, yang tidak diragukan lagi dapat diakses melalui media digital.

3. Cakupan Wilayah

Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang cukup luas, mencakup 38.067,70 km², dan merupakan rumah bagi 2,67 juta penduduk. Provinsi ini terbagi menjadi lima belas kabupaten atau komunitas. Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang luas dengan hanya satu kantor OJK di setiap provinsi; hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan inisiatif literasi dan inklusi keuangan syariah secara keseluruhan. Meskipun provinsi Sulawesi Tenggara memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, hal ini tidak berarti bahwa penduduknya memiliki pengetahuan yang cukup tentang keuangan syariah. OJK harus lebih memprioritaskan edukasi keuangan syariah, mengingat jumlah masyarakat Muslim yang merupakan peluang dan potensi untuk pengembangan ekonomi syariah, khususnya di lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan inovatif, seperti implementasi dan penerapan teknologi secara luas sebagai alat edukasi untuk menginformasikan keuangan syariah kepada masyarakat, yang tidak diragukan lagi keampuhannya.